

Lewat Pembiayaan Investasi Non Anggaran

Perusahaan BUMN Bisa Jadi Investor Proyek Infrastruktur

Pemerintah terus berupaya memanfaatkan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) agar pihak Swasta dan perusahaan pelat merah bisa ambil bagian dalam urusan pembiayaan proyek infrastruktur Nasional.

MENTERI Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, kontribusi perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan untuk pembiayaan proyek pemerintah disektor infrastruktur nasional. Pasalnya, pembiayaan tak bisa hanya mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya terbatas. Langkah ini juga demi mendorong tergeraknya proyek infrastruktur pada 2018.

"APBN sangat terbatas maka anggaran itu hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar," tutur Bambang.

Dijelaskan, Infrastruktur dasar merupakan infrastruktur yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Yang dalam jangka panjang diharapkan bisa membantu usaha pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.

Menurut Bambang, infrastruktur dasar yang menjadi kewajiban dari pemerintah adalah pembangunan rumah, irigasi, jalan arteri desa, air bersih hingga sanitasi.

"Itulah infrastruktur dasar yang harus dibangun oleh pemerintah, dan disitulah APBN harusnya diprioritaskan," katanya.

APBN hanya dapat membiayai 8,7 persen dari total kebutuhan di sektor infrastruktur. Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan negara untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur hingga Tahun 2020 bisa lebih dari Rp 4 ribu triliun.

Dia menerangkan, PINA dianggap menjadi alternatif bagi pemerintah lantaran kebutuhan dan pembangunan infrastruktur dari 2015-2019 mencapai Rp 4.769 triliun.

Sementara APBN/APBD hanya sanggup membiayai 41,3 persen (Rp 1.951,3 triliun).

Sisanya dari kontribusi BUMN dan swasta. Dimana BUMN 22,2

persen (Rp 2.817,7 triliun) dan sisanya 36,5 persen (Rp 1.751,5 triliun) adalah partisipasi swasta.

"Adanya skema PINA diharapkan pihak swasta maupun BUMN bisa ikut berperan dan berpartisipasi membiayai proyek infrastruktur tersebut," katanya.

Alternatif selain memanfaatkan skema PINA adalah berhutang. Menurut Bambang, berhutang memang menjadi salah satu cara untuk dapat menanggulangi biaya yang teramat besar tersebut, namun itu bukan menjadi satu-satunya solusi mensukseskan program infrastruktur. Pendanaan dari hutang pun juga mesti dibekali strategi dalam penggunaannya.

Melalui PINA, Bambang menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan jalan bagi

pihak swasta dan BUMN untuk menjadi investor pada proyek infrastruktur. "Tapi perlu diingat, kita mencari pihak swasta dan BUMN yang tidak memanfaatkan PMN," ungkap Bambang.

Berhasil Tanpa APBN

Bambang mencontohkan proyek yang dikerjakan PT Waskita Toll Road dalam membangun sejumlah ruas tol, baik di Jawa maupun di luar Jawa menjadi salah satu kisah sukses pembangunan infrastruktur tanpa menggunakan APBN. Pekerjaan itu membutuhkan investasi Rp 70 triliun dengan nilai proyek Rp 135 triliun.

"Selanjutnya pengembangan PLTU Batu Bara di Meulaboh, Aceh, dengan nilai proyek Rp 7,5 triliun," katanya. ■ JAR